

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya untuk memperkuat kapasitas desa melalui berbagai program pembangunan yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendorong perekonomian lokal. Meskipun pemerintah memprioritaskan desa sehingga dana pembangunan desa telah tersedia, namun berbagai tantangan kerap muncul dalam proses implementasi program pembangunan desa, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan prioritas desa, serta keterbatasan sumber daya manusia yang paham akan prinsip akuntansi sektor publik.

Survei telah dilakukan oleh BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDes juga belum didukung kesiapan

aparatur kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, evaluasi komprehensif berbasis akuntansi sektor publik sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini akan membantu desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, memberikan panduan yang jelas dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan, serta memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Menurut Wiratna (2015;1). Akuntansi sektor publik adalah jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Nasrulloh & Saputri (2023:45) mengatakan bahwa Akuntansi sektor publik adalah suatu konsep dan praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan entitas pemerintah. Implementasi akuntansi sektor publik menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah desa yang merupakan salah satu entitas pemerintahan lokal yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana publik dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Hasil penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros” yang dilakukan oleh Jumadi & Kusumawati (2023), dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dengan berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin

Anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Tanete telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran dengan terpenuhinya semua indikator tersebut maka pengelolaan keuangan desa sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Hardaya & Jumiran (2021), melalui penelitian mereka yang berjudul “Evaluasi Program Dana Desa Di Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi program dana desa di Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data primer yang berupa studi lapangan, observasi, dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara serta analisis kajian futuristik dalam upaya terciptanya perencanaan partisipatif yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari segi efisiensi dana desa di Desa Kalikebo pencairannya sudah efisien, meskipun ada keterlambatan, dari segi kecukupan sangat bermanfaat bagi desa dan membantu masyarakat, dari segi responsivitas respon masyarakat sangat baik, dari segi ketepatan pengelolaan dana desa sudah terpakai untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai saran yang dapat diberikan antara lain BPD hendaknya meningkatkan pengawasan dana desa, Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur Desa

Kalikebo agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa oleh pemerintah, meningkatkan komunikasi dan sinergi antara aparatur desa dan Pemerintah Kecamatan Trucuk, Pemerintah Desa Kalikebo harus meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam mengelola anggaran, harus dilakukan sosialisasi secara terbuka dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait alokasi anggaran dana desa, dan anggaran desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa dan digunakan secara merata di segala bidang pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin, Sujianto, & Yuliani (2020), yang berjudul Evaluasi program Desa Mekarsari” dengan tujuan penelitian untuk Mengetahui Evaluasi Program Desa mekarsari, Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.informan penelitian adalah kepala desa, sekretaris, bendahara, ketua BPD, pedamping desa, tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan medel penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan menyatakan bahwa pemerintah desa mekarsari telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut peneliti mengevaluasi apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebijakan yang telah dirumuskan, namun masih ditemukan kendala beberapa kendala yakni faktor keterbatasan jumlah dana yang karna sumber pendanaan, sumberdaya

manusia, dan pada saat pelaksanaan beberapa titik lokasi sulit dijangkau karena kondisi geografis daerah lokasi. Berdasarkan tiga hasil penelitian diatas Dengan demikian, evaluasi yang berbasis akuntansi sektor publik dapat menjadi landasan bagi desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabilitas serta lebih efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pendekatan berbasis akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menilai keterlaksanaan program pembangunan desa secara transparan dan akuntabilitas. Melalui akuntansi sektor publik, pemantauan terhadap penggunaan anggaran, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat lebih terukur. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat penggunaan dana desa yang jumlahnya terus meningkat, sehingga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program desa. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keterlaksanaan Program Pembangunan Desa Batuinan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang Berbasis Akuntansi Sektor Publik”. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis maka ditemukan empat program pembangunan Desa Batuinan yang telah terlaksana pada tahun 2022 hingga 2023 yaitu : Pembangunan tempat penampungan air (Bak PAH), Pembangunan Lapangan Olahraga, Perehapan Posyandu dan Pembangunan Kantor Desa. Penelitian ini tujuannya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan pemerintah desa dan kontribusinya terhadap peningkatan tata kelola keuangan yang baik. Serta memahami

seberapa jauh program-program yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal serta apakah penerapan akuntansi sektor publik sudah optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas atau belum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Batuinan dan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sistem keuangan yang lebih efektif dan efisien.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Evaluasi keterlaksanaan program pembangunan Desa Batuinan berbasis akuntansi sektor publik.

1.3 Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana evaluasi keterlaksanaan program pembangunan Desa Batuinan berbasis akuntansi sektor publik?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui evaluasi keterlaksanaan program pembangunan di Desa Batuinan berbasis akuntansi sektor publik.

4.1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a). Manfaat Akademis

Sebagai sumber referensi dan kajian dalam bidang akuntansi sektor publik dan evaluasi program pembangunan desa.

b) Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa Batuinan dalam meningkatkan pengelolaan program pembangunan berbasis akuntansi sektor publik yang lebih efektif dan efisien.

c). Manfaat Sosial

Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan pembangunan yang lebih baik.